



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG.
NOMOR : 244 /SK-36.03.UP.02.04/IX/2020**

**TENTANG
REEVISI KEEMPAT SUSUNAN TIM I PANITIA AJUDIKASI, SATUAN TUGAS FISIK, SATUAN TUGAS
YURIDIS DAN SATUAN TUGAS ADMINISTRASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
TAHUN ANGGARAN 2020**

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi rakyat khususnya, perlu dilakukan percepatan pendaftaran tanah lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik, dan Satuan Tugas Yuridis sebagai pelaksana percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap;
 - c. bahwa dalam melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang telah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Lokasi yang intinya menjadikan 43 (empat puluh tiga) desa di wilayah 7(tujuh) kecamatan sebagai lokasi pelaksanaan Pendaftaran tanah sistematis lengkap tersebut;
 - d. bahwa terhadap banyaknya bidang tanah dan jumlah desa tersebut pada huruf c di atas, maka dipandang perlu untuk membentuk lebih dari satu tim Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik, dan Satuan Tugas Yuridis, agar pelaksanaannya berjalan optimal;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tentang Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik, dan Satuan Tugas Yuridis Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang terdiri dari 5 (lima) Panitia Pelaksana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
 - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3696);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
9. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
10. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemeriksaan Tanah;
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1591) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1111);
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);
16. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 37/KEP-7.1/II/2017 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
17. Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS-30.01.01/II/2019 Tanggal 01 Februari 2020 tentang Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap;
18. Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS-400/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bidang Yuridis;
19. Petunjuk Teknis Nomor 1069/3.1-100/IV/2018 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG TENTANG REVISI KEEMPAT SUSUNAN TIM I PANITIA AJUDIKASI, SATUAN TUGAS FISIK, SATUAN TUGAS YURIDIS DAN SATUAN TUGAS ADMINISTRASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TAHUN 2020.

- KESATU : Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai anggota Tim I Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Wilayah Kabupaten Tangerang yang meliputi 14 Desa/Kelurahan dan 6 Kecamatan yaitu :
1. Kelurahan/Desa Balaraja Kecamatan Balaraja
 2. Kelurahan/Desa Cangkudu Kecamatan Balaraja
 3. Kelurahan/Desa Saga Kecamatan Balaraja
 4. Kelurahan/Desa Tobat Kecamatan Balaraja
 5. Kelurahan/Desa Cikuya Kecamatan Solear
 6. Kelurahan/Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear
 7. Kelurahan/Desa Solear Kecamatan Solear
 8. Kelurahan/Desa Cisereh Kecamatan Tigaraksa
 9. Kelurahan/Desa Sukasari Kecamatan Rajeg
 10. Kelurahan/Desa Sindangsono Kecamatan Sindang Jaya
 11. Kelurahan/Desa Lembangsari Kecamatan Rajeg
 12. Kelurahan/Desa Jambu Karya Kecamatan Rajeg
 13. Kelurahan/Desa Rajeg Kecamatan Rajeg
 14. Kelurahan/Desa Gelam Jaya Kecamatan Pasar Kemis
- KEDUA : Panitia Ajudikasi PTSL sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan dan menyelesaikan PTSL secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung jawab/akuntabel. Panitia Ajudikasi PTSL mempunyai tugas:
- a. menyiapkan rencana kerja dan jadwal kegiatan PTSL;
 - b. mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;
 - c. memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti kepemilikan/penguasaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - d. memeriksa kebenaran formal data fisik dan data yuridis alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah;
 - e. mengumumkan data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah yang sudah dikumpulkan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang disengketakan;
 - g. mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf e, sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak;
 - h. menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan kepada Kepala Kantor Pertanahan; dan
 - i. melakukan supervisi pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satgas Fisik dan Satgas Yuridis.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Panitia Ajudikasi PTSL dibantu oleh Satuan Tugas Fisik (Satgas Fisik), Satuan Tugas Yuridis (Satgas Yuridis), dan Satuan Tugas Administrasi (Satgas Administrasi), dengan susunan keanggotaan Satgas Fisik, Satgas Yuridis dan Satgas Administrasi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Satgas Fisik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan dan menyelesaikan PTSL secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung jawab/akuntabel. Satgas Fisik mempunyai tugas:
- a. pengukuran batas bidang tanah secara kadastral yang dituangkan pada Gambar Ukur, atas penunjukan pemilik tanah atau kuasanya;
 - b. melaksanakan pemetaan bidang tanah pada Peta Pendaftaran dan Peta Bidang Tanah;
 - c. menjalankan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang berkaitan dengan data fisik bidang tanah pada aplikasi KKP; dan
 - d. menandatangani Gambar Ukur dan seluruh dokumen dan peta hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanah; dan
 - e. membuat peta pendaftaran tanah sebagai dasar pengumpulan data fisik dan data yuridis;

- KELIMA** : Satgas Yuridis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan dan menyelesaikan PTSL secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung jawab/akuntabel. Satgas Yuridis mempunyai tugas:
- a. melakukan pemeriksaan dokumen bukti kepemilikan/penguasaan bidang tanah;
 - b. memeriksa riwayat tanah dan menarik surat-surat bukti pemilikan atau penguasaan tanah yang asli dan memberikan tanda terima;
 - c. membuat daftar bidang-bidang tanah yang telah diajudikasi;
 - d. membuat laporan pelaksanaan pekerjaan secara berkala;
 - e. menyiapkan pengumuman mengenai data yuridis;
 - f. menginventarisasi sanggahan/keberatan dan penyelesaiannya;
 - g. menyiapkan data untuk pembuatan Daftar Isian dan pemeriksaan sertifikat; dan
 - h. menginput kegiatan PTSL ke dalam Aplikasi KKP.
- KEENAM** : Satgas Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan PTSL secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung jawab/akuntabel. Satgas Administrasi mempunyai tugas:
- a. melaksanakan tugas pengetikan, penggandaan dokumen, penerimaan surat-surat umum dan pemberian tanda terimanya dan pekerjaan administratif lainnya;
 - b. menyiapkan laporan ke Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah BPN dan unit kerja lain yang dianggap perlu;
 - c. menyiapkan daftar hadir;
 - d. membuat laporan hasil rapat;
 - e. menyiapkan laporan hasil kegiatan secara berkala setiap bulan;
 - f. membuat evaluasi untuk laporan hasil kegiatan secara berkala setiap bulan;
 - g. menyiapkan pencetakan/penjahitan sertifikat; dan
 - h. mempersiapkan pertanggungjawaban keuangan.
- KETUJUH** : Sumber pendanaan untuk Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-056.01.2.429853/2020 tanggal 12 November 2019.
- KEDELAPAN** : Dengan ditetapkan Keputusan ini maka Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor : 64 /SK-36.03.UP.02.04/II/2020 Tanggal : 03 Februari 2020 tentang Revisi Pertama Susunan Tim I Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis Dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2020 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 01 September 2020

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Tangerang



Gembong Joko Wuryanto, S.H., M.Si
NIP. 19630130 198403 1 001

Tembusandisampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan para Direktur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
3. Gubernur Banten;
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten;
5. Bupati Tangerang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN

Nomor : 244 /SK-36.03.UP.02.04/IX/2020

Tanggal : 01 September 2020

Tentang : Revisi Keempat Susunan TIM I Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, dan Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2020.

**REVISI KEEMPAT SUSUNAN TIM I PANITIA AJUDIKASI, SATUAN TUGAS FISIK, SATUAN TUGAS YURIDIS
DAN SATUAN TUGAS ADMINISTRASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TAHUN 2020
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG**

Penanggung Jawab : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang

A. Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

No.	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan dalam Panitia
1.	AHMAD MUNARDI, SH	19700614 199703 1 002	Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat	Ketua Merangkap Anggota
2.	ANDIKA ARIADARMA, S.ST	19821226 200604 1 006	Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik	Ketua Teknis
3.	TETENG IRIANDI	19630121 198903 1 005	Pengadministrasi Pertanahan	Ketua Yuridis
4.	Hj. NURHAYATI, SH	19621125 198203 2 003	Kepala Urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sekretaris
5.	ACHMAD SUBAGJA, S. Sos	-	Kepala Desa Balaraja	Anggota
6.	H. ABDULLAH, S.Sos	-	Kepala Desa Cangkudu	Anggota
7.	SARNATA	-	Kepala Desa Saga	Anggota
8.	EMAN SUHERMAN	-	Kepala Desa Tobat	Anggota
9.	MOCH. SANUSI AR	-	Kepala Desa Gelam Jaya	Anggota
10.	ADE SAPEI	-	Kepala Desa Cikuya	Anggota
12.	MADRAIS, S.E	-	Kepala Desa Pasanggrahan	Anggota
13.	MADROMI, S.E	-	Kepala Desa Solear	Anggota

14.	H.M. ISKANDAR	-	Kepala Desa Cisereh	Anggota
15.	MUKHLIS	-	Kepala Desa Sukasari	Anggota
16.	SUHERMAN	-	Kepala Desa Jambu Karya	Anggota
17.	ELIYAH	-	Kepala Desa Lembangsari	Anggota
18.	YANTO FIRMANTO	-	Kepala Desa Rajeg	Anggota
19.	MUHAMMAD AFANDI, SH	-	Kepala Desa Sindangsono	Anggota

B. Satuan Tugas Yuridis

No	Nama	Keterangan	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Panitia	Biaya / Bidang (Rp)
- Desa Sindangsono						
1.	HJ. SOPIAH	Desa Sindangsono	19660405 198903 2 001	Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan	Ketua Merangkap Anggota	5.720
2.	SAUT MARILUTUA DABUKE	Desa Sindangsono	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	5.000
3.	DENI WIRAWAN	Desa Sindangsono	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
4.	SUBANDALI ABUNG	Desa Sindangsono	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
5.	H URMAN	Desa Sindangsono	-	Mitra Desa	Anggota	5.000
6.	NURHASIM	Desa Sindangsono	-	Mitra Desa	Anggota	5.000

No	Nama	Keterangan	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Panitia	Biaya / Bidang (Rp)
- Desa Balaraja						
1.	HJ. SOPIAH	Desa Balaraja	19660405 198903 2 001	Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan	Ketua Merangkap Anggota	5.720
2.	IFTIANA SAUSAN	Desa Balaraja	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	5.000
3.	ARIANDHIKA NOFRIANSYAH	Desa Balaraja	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
4.	SUBANDALI ABUNG	Desa Balaraja	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
5.	SUKARDI ISMAIL	Desa Balaraja	-	Mitra Desa	Anggota	5.000
6.	SUPRIYANTO	Desa Balaraja	-	Mitra Desa	Anggota	5.000

No	Nama	Keterangan	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Panitia	Biaya / Bidang (Rp)
- Desa Saga						
1.	HJ. SOPIAH	Desa Saga	19660405 198903 2 001	Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan	Ketua Merangkap Anggota	5.720
2.	SAUT MARULITUA DABUKE	Desa Saga	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	5.000
3.	ARIANDHIKA NOFRIANSYAH	Desa Saga	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
4.	JEKTARA	Desa Saga	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
5.	NASIMAN	Desa Saga	-	Mitra Desa	Anggota	5.000
6.	AKHMAD SANURI	Desa Saga	-	Mitra Desa	Anggota	5.000

No	Nama	Keterangan	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Panitia	Biaya / Bidang (Rp)
- Desa Cangkudu						
1.	HJ. SOPIAH	Desa Cangkudu	19660405 198903 2 001	Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan	Ketua Merangkap Anggota	5.720
2.	IFTIANA SAUSAN	Desa Cangkudu	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	5.000
3.	DENI WIRAWAN	Desa Cangkudu	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
4.	JEKTARA	Desa Cangkudu	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
5.	RAMDONI	Desa Cangkudu	-	Mitra Desa	Anggota	5.000
6.	ABU BAKAR	Desa Cangkudu	-	Mitra Desa	Anggota	5.000

No	Nama	Keterangan	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Panitia	Biaya / Bidang (Rp)
- Desa Tobat						
1.	HJ. SOPIAH	Desa Tobat	19660405 198903 2 001	Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan	Ketua Merangkap Anggota	5.720
2.	MAULIDIAH FAJRI	Desa Tobat	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	5.000
3.	ARIANDHIKA NOFRIANSYAH	Desa Tobat	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
4.	TASLIM	Desa Tobat	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
5.	AKHMAD JAELANI H	Desa Tobat	-	Mitra Desa	Anggota	5.000
6.	HENDRAWAN KUSUMA	Desa Tobat	-	Mitra Desa	Anggota	5.000

No	Nama	Keterangan	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Panitia	Biaya / Bidang (Rp)
- Desa Cikuya						
1.	HJ. SOPIAH	Desa Cikuya	19660405 198903 2 001	Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan	Ketua Merangkap Anggota	5.720
2.	NUR FUJANTY	Desa Cikuya	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	5.000
3.	JEKTARA	Desa Cikuya	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
4.	TASLIM	Desa Cikuya	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
5.	AGUNG HADIANA	Desa Cikuya	-	Mitra Desa	Anggota	5.000
6.	DEDI SUPRIYADI	Desa Cikuya	-	Mitra Desa	Anggota	5.000

No	Nama	Keterangan	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Panitia	Biaya / Bidang (Rp)
- Desa Pasanggrahan						
1.	HJ. SOPIAH	Desa Pasanggrahan	19660405 198903 2 001	Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan	Ketua Merangkap Anggota	5.720
2.	DIMAS AFRIALDI	Desa Pasanggrahan	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	5.000
3.	FIRMANSYAH	Desa Pasanggrahan	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
4.	UCU PAMUNGKAS	Desa Pasanggrahan	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
5.	SUYATNO	Desa Pasanggrahan	-	Mitra Desa	Anggota	5.000
6.	TATANG SUMARNA	Desa Pasanggrahan	-	Mitra Desa	Anggota	5.000

No	Nama	Keterangan	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Panitia	Biaya / Bidang (Rp)
- Desa Solear						
1.	HJ. SOPIAH	Desa Solear	19660405 198903 2 001	Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan	Ketua Merangkap Anggota	5.720
2.	NUR FUJIYANTI	Desa Solear	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	5.000
3.	UCU PAMUNGKAS	Desa Solear	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
4.	TASLIM	Desa Solear	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
5.	ROBIH	Desa Solear	-	Mitra Desa	Anggota	5.000
6.	SAMUN	Desa Solear	-	Mitra Desa	Anggota	5.000

No	Nama	Keterangan	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Panitia	Biaya / Bidang (Rp)
- Desa Cisereh						
1.	HJ. SOPIAH	Desa Cisereh	19660405 198903 2 001	Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan	Ketua Merangkap Anggota	5.720
2.	NUR FUJIYANTI	Desa Cisereh	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	5.000
3.	UCU PAMUNGKAS	Desa Cisereh	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
4.	AHMAD ZALALUDIN	Desa Cisereh	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
5.	SAYUKI	Desa Cisereh	-	Mitra Desa	Anggota	5.000
6.	AL JUPRI	Desa Cisereh	-	Mitra Desa	Anggota	5.000

No	Nama	Keterangan	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Panitia	Biaya / Bidang (Rp)
- Desa Sukasari						
1.	HJ. SOPIAH	Desa Sukasari	19660405 198903 2 001	Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan	Ketua Merangkap Anggota	5.720
2.	DWI CAHYANI	Desa Sukasari	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	5.000
3.	NURDIN	Desa Sukasari	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
4.	FEBRI IRFAN HERMAWAN	Desa Sukasari	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
5.	SUPYANI	Desa Sukasari	-	Mitra Desa	Anggota	5.000
6.	HOLILUROHMAN	Desa Sukasari	-	Mitra Desa	Anggota	5.000

No	Nama	Keterangan	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Panitia	Biaya / Bidang (Rp)
- Desa Lembangsari						
1.	HJ. SOPIAH	Desa Lembangsari	19660405 198903 2 001	Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan	Ketua Merangkap Anggota	5.720
2.	MAULIDIAH FAJRI	Desa Lembangsari	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	5.000
3.	FEBRI IRFAN HERMAWAN	Desa Lembangsari	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
4.	AHMAD ZALALUDIN	Desa Lembangsari	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
5.	WAHYUDI	Desa Lembangsari	-	Mitra Desa	Anggota	5.000
6.	JAENUDIN	Desa Lembangsari	-	Mitra Desa	Anggota	5.000

No	Nama	Keterangan	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Panitia	Biaya / Bidang (Rp)
- Desa Jambu Karya						
1.	HJ. SOPIAH	Desa Jambu Karya	19660405 198903 2 001	Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan	Ketua Merangkap Anggota	5.720
2.	DWI CAHYANI	Desa Jambu Karya	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	5.000
3.	ARIANDHIKA NOFRIANSYAH	Desa Jambu Karya	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
4.	FIRMANSYAH	Desa Jambu Karya	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
5.	MITRA DESA	Desa Jambu Karya	-	Mitra Desa	Anggota	5.000
6.	MITRA DESA	Desa Jambu Karya	-	Mitra Desa	Anggota	5.000

No	Nama	Keterangan	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Panitia	Biaya / Bidang (Rp)
- Desa Rajeg						
1.	HJ. SOPIAH	Desa Rajeg	19660405 198903 2 001	Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan	Ketua Merangkap Anggota	5.720
2.	DIMAS AFRIALDI	Desa Rajeg	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	5.000
3.	NURDIN	Desa Rajeg	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
4.	FIRMANSYAH	Desa Rajeg	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
5.	DIDI ARYADI	Desa Rajeg	-	Mitra Desa	Anggota	5.000
6.	DEDI SOPIANSYAH	Desa Rajeg	-	Mitra Desa	Anggota	5.000

No	Nama	Keterangan	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Panitia	Biaya / Bidang (Rp)
- Desa Gelam Jaya						
1.	HJ. SOPIAH	Desa Gelam Jaya	19660405 198903 2 001	Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan	Ketua Merangkap Anggota	5.720
2.	DWI CAHYANI	Desa Gelam Jaya	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	5.000
3.	NURDIN	Desa Gelam Jaya	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
4.	FEBRI IRFAN HERMAWAN	Desa Gelam Jaya	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
5.	TAMIM HUDRI	Desa Gelam Jaya	-	Mitra Desa	Anggota	5.000
6.	IIN MARLINA	Desa Gelam Jaya	-	Mitra Desa	Anggota	5.000

C. Satuan Tugas Fisik

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Satgas	Biaya /Bidang (Rp) K1 - K3
- Desa Sindang Sono					
1.	ANDIKA ARIADARMA,S.ST	19821226 200604 1 006	Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik	Ketua	29.000
2.	DEDI MULYADI	19780704 200701 1 002	Petugas Ukur	Anggota/Petugas Ukur	29.000
3.	RADEN M. LUKMAN F.P	1-0183-19	Surveyor Kadaster	Pembantu Ukur	8.000
4.	ABDURAHMAN ARIADARMA	2-1923-18	Asisten Surveyor	Pembantu Ukur	8.000

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Satgas	Biaya /Bidang (Rp) K1 - K3
- Desa Gelam Jaya					
1.	ANDIKA ARIADARMA,S.ST	19821226 200604 1 006	Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik	Ketua	29.000
2.	DEDI MULYADI	19780704 200701 1 002	Petugas Ukur	Anggota/Petugas Ukur	29.000
3.	DAWUD ACHMAD PRAKOSA	2-0091-14	Asisten Surveyor	Pembantu Ukur	8.000
4.	ABDULLAH FAQIH SAPUTRA	1-0038-19	Surveyor Kadaster	Pembantu Ukur	8.000

/ D. Satuan Tugas Administrasi ...

D. Satuan Tugas Administrasi

No.	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Satgas
1.	Hj. NURHAYATI, SH	19621125 198203 2 003	Kepala Urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Ketua
2.	IMAN WAHYU FIRMANSYAH	-	Pegawai Tidak Tetap/Admin	Anggota
3.	RYAN YOGA PRANATA	-	Pegawai Tidak Tetap/Admin	Anggota
	WIDIATMOKO	-	Pegawai Tidak Tetap/Admin	Anggota
4.	TRIYANA	-	Pegawai Tidak Tetap/Cetak SU	Anggota
5.	ARIANDHIKA NOFRIANSYAH	-	Pegawai Tidak Tetap/Cetak BT	Anggota
6.		-	Pegawai Tidak Tetap/Integrasi	Anggota

/ E. Petugas Pemeriksa Tanah...

E. Petugas Pemeriksaan Tanah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Satgas	Biaya/Bidang (Rp)
1.	ANDIKA ARIADARMA,S.ST	19821226 200604 1 006	Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik	Ketua Teknis	15.500
2.	TETENG IRIANDI	19630121 198903 1 005	Pengadministrasi Pertanahan	Ketua Yuridis	15.500
3.	ACHMAD SUBAGJA, S. Sos	-	Kepala Desa Balaraja	Anggota	15.400
4.	H. ABDULLAH, S.Sos	-	Kepala Desa Cangkudu	Anggota	15.400
5.	SARNATA	-	Kepala Desa Saga	Anggota	15.400
6.	EMAN SUHERMAN	-	Kepala DesaTobat	Anggota	15.400
7.	MOCH. SANUSI AR	-	Kepala Desa Gelam Jaya	Anggota	15.400
8.	ADE SAPEI	-	Kepala Desa Cikuya	Anggota	15.400
9.	MADRAIS, S.E	-	Kepala Desa Pasanggrahan	Anggota	15.400
10.	MADROMI, S.E	-	Kepala Desa Solear	Anggota	15.400
11.	H.M. ISKANDAR	-	Kepala Desa Cisereh	Anggota	15.400

12.	MUKHLIS	-	Kepala Desa Sukasari	Anggota	15.400
13.	SUHERMAN	-	Kepala Desa Jambu Karya	Anggota	15.400
14.	ELIYAH	-	Kepala Desa Lembangsari	Anggota	15.400
15.	YANTO FIRMANTO	-	Kepala Desa Rajeg	Anggota	15.400
16.		-	Kepala Desa Sindangsono	Anggota	15.400

F. Peneliti Data Yuridis Panitia Ajudikasi

No.	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan dalam Panitia	Biaya/Bidang (Rp)
1.	AHMAD MUNARDI, SH	19700614 199703 1 002	Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat	Ketua Merangkap Anggota	5.600
2.	ANDIKA ARIADARMA, S.ST	19821226 200604 1 006	Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik	Ketua Teknis	5.600
3.	SALEH YAHYA. S.H., M.Kn	19620505 198903 1 009	Kepala Sub Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu	Ketua Yuridis	5.600
4.	Hj. NURHAYATI, SH	19621125 198203 2 003	Kepala Urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sekretaris	5.600
5.	ACHMAD SUBAGJA, S. Sos	-	Kepala Desa Balaraja	Anggota	5.600
6.	H. ABDULLAH, S.Sos	-	Kepala Desa Cangkudu	Anggota	5.600
7.	SARNATA	-	Kepala Desa Saga	Anggota	5.600
8.	EMAN SUHERMAN	-	Kepala Desa Tobat	Anggota	5.600
9.	MOCH. SANUSI AR	-	Kepala Desa Gelam Jaya	Anggota	5.600
10.	ADE SAPEI	-	Kepala Desa Cikuya	Anggota	5.600
12.	MADRAIS, S.E	-	Kepala Desa Pasanggrahan	Anggota	5.600
13.	MADROMI, S.E	-	Kepala Desa Solear	Anggota	5.600

14.	H.M. ISKANDAR	-	Kepala Desa Cisereh	Anggota	Biaya/Bidang (Rp)
15.	MUKHLIS	-	Kepala Desa Sukasari	Anggota	5.600
16.	SUHERMAN	-	Kepala Desa Jambu Karya	Anggota	5.600
17.	ELIYAH	-	Kepala Desa Lembangsari	Anggota	5.600
18.	YANTO FIRMANTO	-	Kepala Desa Rajeg	Anggota	5.600
19.		-	Kepala Desa Sindangsono	Anggota	5.600



Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Tangerang

Gembong Joko Wuryanto, S.H., M.Si
NIP. 19630130 198403 1 001



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN**

JL. H. ABDUL HAMID KAV. 8, TIGARAKSA TANGERANG 15720 TELP. (021) 5592455 FAX. (021) 5992183
EMAIL : kab-tangerang@atrbpn.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG.
NOMOR : 185 /SK-36.03.UP.02.04/VII/2020**

TENTANG

**REVISI KEDUA SUSUNAN TIM II PANITIA AJUDIKASI, SATUAN TUGAS FISIK, SATUAN TUGAS
YURIDIS DAN SATUAN TUGAS ADMINISTRASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
TAHUN ANGGARAN 2020**

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi rakyat khususnya, perlu dilakukan percepatan pendaftaran tanah lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik, dan Satuan Tugas Yuridis sebagai pelaksana percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap;
- c. bahwa dalam melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang telah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Lokasi yang intinya menjadikan 43 (empat puluh tiga) desa di wilayah 7(tujuh) kecamatan sebagai lokasi pelaksanaan Pendaftaran tanah sistematis lengkap tersebut;
- d. bahwa terhadap banyaknya bidang tanah dan jumlah desa tersebut pada huruf c di atas, maka dipandang perlu untuk membentuk lebih dari satu tim Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik, dan Satuan Tugas Yuridis, agar pelaksanaannya berjalan optimal;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tentang Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik, dan Satuan Tugas Yuridis Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang terdiri dari 5 (lima) Panitia Pelaksana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);

/ 5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3696);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
9. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
10. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemeriksaan Tanah;
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1591) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1111);
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);
16. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 37/KEP-7.1/II/2017 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
17. Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS-30.01.01/II/2019 Tanggal 01 Februari 2020 tentang Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap;
18. Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS-400/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bidang Yuridis;
19. Petunjuk Teknis Nomor 1069/3.1-100/IV/2018 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG TENTANG REVISI KEDUA SUSUNAN TIM II PANITIA AJUDIKASI, SATUAN TUGAS FISIK, SATUAN TUGAS YURIDIS DAN SATUAN TUGAS ADMINISTRASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TAHUN 2020.

/ KESATU ...

- KESATU : Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai anggota Tim IIPanitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Wilayah Kabupaten Tangerang yang meliputi 9 Desa/Kelurahan dan 2 Kecamatan yaitu :
1. Kelurahan/Desa Bojong Kamal Kecamatan Legok
 2. Kelurahan/Desa Bojong Kecamatan Cikupa
 3. Kelurahan/Desa Ciangir Kecamatan Legok
 4. Kelurahan/Desa Cirarab Kecamatan Legok
 5. Kelurahan/Desa Cibadak Kecamatan Cikupa
 6. Kelurahan/Desa Legok Kecamatan Legok
 7. Kelurahan/Desa Cikupa Kecamatan Cikupa
 8. Kelurahan/Desa Dukuh Kecamatan Cikupa
 9. Kelurahan/Desa Budi Mulya Kecamatan Cikupa
- KEDUA : Panitia Ajudikasi PTSL sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan dan menyelesaikan PTSL secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung jawab/akuntabel. Panitia Ajudikasi PTSL mempunyai tugas:
- a. menyiapkan rencana kerja dan jadwal kegiatan PTSL;
 - b. mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;
 - c. memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti kepemilikan/penguasaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - d. memeriksa kebenaran formal data fisik dan data yuridis alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah;
 - e. mengumumkan data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah yang sudah dikumpulkan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang disengketakan;
 - g. mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf e, sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak;
 - h. menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan kepada Kepala Kantor Pertanahan; dan
 - i. melakukan supervisi pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satgas Fisik dan Satgas Yuridis.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Panitia Ajudikasi PTSL dibantu oleh Satuan Tugas Fisik (Satgas Fisik), Satuan Tugas Yuridis (Satgas Yuridis), dan Satuan Tugas Administrasi (Satgas Administrasi), dengan susunan keanggotaan Satgas Fisik, Satgas Yuridis dan Satgas Administrasi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Satgas Fisik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan dan menyelesaikan PTSL secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung jawab/akuntabel. Satgas Fisik mempunyai tugas:
- a. pengukuran batas bidang tanah secara kadastral yang dituangkan pada Gambar Ukur, atas penunjukan pemilik tanah atau kuasanya;
 - b. melaksanakan pemetaan bidang tanah pada Peta Pendaftaran dan Peta Bidang Tanah;
 - c. menjalankan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang berkaitan dengan data fisik bidang tanah pada aplikasi KKP; dan
 - d. menandatangani Gambar Ukur dan seluruh dokumen dan peta hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanah; dan
 - e. membuat peta pendaftaran tanah sebagai dasar pengumpulan data fisik dan data yuridis;
- KELIMA : Satgas Yuridis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan dan menyelesaikan PTSL secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung jawab/akuntabel. Satgas Yuridis mempunyai tugas:
- a. melakukan pemeriksaan dokumen bukti kepemilikan/penguasaan bidang tanah;

- b. memeriksa riwayat tanah dan menarik surat-surat bukti pemilikan atau penguasaan tanah yang asli dan memberikan tanda terima;
- c. membuat daftar bidang-bidang tanah yang telah diajudikasi;
- d. membuat laporan pelaksanaan pekerjaan secara berkala;
- e. menyiapkan pengumuman mengenai data yuridis;
- f. menginventarisasi sanggahan/keberatan dan penyelesaiannya;
- g. menyiapkan data untuk pembuatan Daftar Isian dan pemeriksaan sertipikat; dan
- h. menginput kegiatan PTSL ke dalam Aplikasi KKP.

- KEENAM** : Satgas Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan PTSL secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung jawab/akuntabel. Satgas Administrasi mempunyai tugas:
- a. melaksanakan tugas pengetikan, penggandaan dokumen, penerimaan surat-surat umum dan pemberian tanda terimanya dan pekerjaan administratif lainnya;
 - b. menyiapkan laporan ke Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah BPN dan unit kerja lain yang dianggap perlu;
 - c. menyiapkan daftar hadir;
 - d. membuat laporan hasil rapat;
 - e. menyiapkan laporan hasil kegiatan secara berkala setiap bulan;
 - f. membuat evaluasi untuk laporan hasil kegiatan secara berkala setiap bulan;
 - g. menyiapkan pencetakan/penjahitan sertipikat; dan
 - h. mempersiapkan pertanggungjawaban keuangan.
- KETUJUH** : Sumber pendanaan untuk Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-056.01.2.429853/2020 tanggal 12 November 2019.
- KEDELAPAN** : Dengan ditetapkan Keputusan ini maka Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor : 85 /SK-36.03.UP.02.04/III/2020 Tanggal : 04 Maret 2020 tentang Revisi Pertama Susunan Tim I Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis Dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2020 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 01 Juli 2020

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Tangerang



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan para Direktur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
3. Gubernur Banten;
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten;
5. Bupati Tangerang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN

Nomor : 185 /SK-36.03.UP.02.04/VII/2020

Tanggal : 01 Juli 2020

Tentang : Revisi Kedua Susunan TIM II Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, dan Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2020.

**REVISI KEDUA SUSUNAN TIM II PANITIA AJUDIKASI, SATUAN TUGAS FISIK, SATUAN TUGAS YURIDIS
DAN SATUAN TUGAS ADMINISTRASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TAHUN 2020
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG**

Penanggung Jawab : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang

A. Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

No.	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan dalam Panitia
1.	BAMBANG MUDIYONO, SH	19630118 198603 1 003	Kepala Seksi Penataan Pertanahan	Ketua Merangkap Anggota
2.	CUCU SUDRAJAT, S.IP., M.H	19750517 199403 1 002	Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan	Ketua Teknis
3.	GINA, S.Sos.,M.Si	19630609 198909 1 001	Kepala Sub Seksi Fasilitas Pengadaan Tanah dan Penetapan Tanah Pemerintah	Ketua Yuridis
4.	LITA DEWI WULANDARI, S.Sos., M.Ikom	19790401 200804 2 001	Kepala Sub Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT	Sekretaris
5.	SUHERMAN	-	Kepala Desa Bojong Kamal	Anggota
6.	ANDI YANA S.Sos	-	Kepala Desa Bojong	Anggota
7.	H. ASEP NURHIDAYAT	-	Kepala Desa Ciangir	Anggota
8.	Hj. IMAS R.L	-	Kepala Desa Cirarab	Anggota
9.	ADI SOPIAN	-	Kepala Desa Cibadak	Anggota
10.	MULYANA, S.E	-	Kepala Desa Legok	Anggota
11.	ABU MUTOLIB	-	Lurah Cikupa	Anggota
12.	ADHARUDIN	-	Kepala Desa Dukuh	Anggota
13.	H. ASAN	-	Kepala Desa Budi Mulya	Anggota

/B. Satuan Tugas Yuridis ...

B. Satuan Tugas Yuridis

No	Nama	Keterangan	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Panitia	Biaya / Bidang (Rp)
- Desa Cikupa, Desa Bojong, dan Desa Budi Mulya						
1.	SUWARNO	Desa Cikupa, Desa Bojong, dan Desa Budi Mulya	19700721 199303 1 001	Pengolah Data Yuridis	Ketua Merangkap Anggota	5.720
2.	TAJUL ARIFIN	Desa Cikup, Desa Bojong, dan Desa Budi Mulya	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	5.000
4.	KIKIN NUGRAHA	Desa Budi Mulya dan Desa Cikupa	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
5.	AHMAD SYAFEI	Desa Bojong dan Desa Cikupa	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
6.	SLAMET PURBOYO	Desa Budi Mulya dan Desa Bojong	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
7.	SUHENDI	Desa Cikupa	-	Mitra Desa	Anggota	5.000
8.	IQBAL AWALUDIN	Desa Cikupa	-	Mitra Desa	Anggota	5.000
9.	ENDANG SURYANA	Desa Bojong	-	Mitra Desa	Anggota	5.000
10.	PAHRUDIN	Desa Bojong	-	Mitra Desa	Anggota	5.000
11.	MADHANI	Desa Budi Mulya	-	Mitra Desa	Anggota	5.000
12.	HAERUDIN	Desa Budi Mulya	-	Mitra Desa	Anggota	5.000

No	Nama	Keterangan	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Panitia	Biaya / Bidang (Rp)
- Desa Cibadak dan Desa Dukuh						
1.	SUWARNO	Desa Cibadak dan Desa Dukuh	19700721 199303 1 001	Pengolah Data Yuridis	Ketua Merangkap Anggota	5.720
2.	JULMI RANDI	Desa Cibadak dan Desa Dukuh	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	5.000
4.	BAGUS SETIAWAN BENY	Desa Cibadak dan Desa Dukuh	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
5.	AGUS ROKHMAT	Desa Cibadak dan Desa Dukuh	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
6.	ADINATA	Desa Cibadak	-	Mitra Desa	Anggota	5.000
7.	DEDE HERMANSYAH	Desa Cibadak	-	Mitra Desa	Anggota	5.000
8.	H. SYAFRUDIN	Desa Dukuh	-	Mitra Desa	Anggota	5.000
9.	AHMAD JUWENI	Desa Dukuh	-	Mitra Desa	Anggota	5.000

No	Nama	Keterangan	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Panitia	Biaya / Bidang (Rp)
- Desa Legok dan Desa Cirarab						
1.	BUDI HERU PAWOKO	Desa Legok dan Desa Cirarab	19700510 199103 1 006	Pengadministrasi Pertanahan	Ketua Merangkap Anggota	5.720
2.	INDAH SEPTIANI	Desa Legok dan Desa Cirarab	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	5.000
4.	PANJI PUTRA PRATAMA	Desa Legok dan Desa Cirarab	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
5.	SUTISNA	Desa Legok dan Desa Cirarab	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
6.	CECEP SUPRIYADI	Desa Legok	-	Mitra Desa	Anggota	5.000
7.	EKA NURHIDAYAT	Desa Legok	-	Mitra Desa	Anggota	5.000
8.	GUSTOMI	Desa Cirarab	-	Mitra Desa	Anggota	5.000
9.	ABENG SUPRIYATNA	Desa Cirarab	-	Mitra Desa	Anggota	5.000

No	Nama	Keterangan	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Panitia	Biaya / Bidang (Rp)
- Desa Ciangir dan Desa Bojong Kamal						
1.	BUDI HERU PAWOKO	Desa Ciangir dan Desa Bojong Kamal	19700510 199103 1 006	Pengadministrasi Pertanahan	Ketua Merangkap Anggota	5.720
2.	INDAH SEPTIANI	Desa Ciangir dan Desa Bojong Kamal	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	5.000
4.	AHMAD DZIKRI HAFIZI	Desa Ciangir dan Desa Bojong Kamal	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
5.	ENDANG ZULKARNAEN	Desa Ciangir dan Desa Bojong Kamal	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
6.	RADEN H. ENDANG SURYATIN	Desa Ciangir	-	Mitra Desa	Anggota	5.000
7.	HASANUDIN	Desa Ciangir	-	Mitra Desa	Anggota	5.000
8.	DUDY SULAKSONO	Desa Bojong Kamal	-	Mitra Desa	Anggota	5.000
9.	SUDIRMAN	Desa Bojong Kamal	-	Mitra Desa	Anggota	5.000

C. Satuan Tugas Fisik

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Satgas	Biaya /Bidang (Rp) K1 - K3
- Desa Ciangir					
1.	CUCU SUDRAJAT, S.IP., M.H	19750517 199403 1 002	Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan	Ketua	36.250
2.	DEDI MULYADI	19780704 200701 1 002	Petugas Ukur	Anggota/Petugas Ukur	36.250
3.	MARWANDI	2-0095-47	Asisten Surveyor	Anggota/ Pembantu Ukur	10.000
4.	FAKHRUL AZIZ	2-2848-18	Asisten Surveyor	Anggota/ Pembantu Ukur	10.000

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Satgas	Biaya /Bidang (Rp) K1 - K3
- Desa Cirarab					
1.	CUCU SUDRAJAT, S.IP., M.H	19750517 199403 1 002	Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan	Ketua	36.250
2.	DEDI MULYADI	19780704 200701 1 002	Petugas Ukur	Anggota/Petugas Ukur	36.250
3.	WAHYU PANCA	1-0018-16	Surveyor Kadaster	Anggota/ Pembantu Ukur	10.000
4.	ALDI WINATA	2-2851-18	Asisten Surveyor	Anggota/ Pembantu Ukur	10.000

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Satgas	Biaya /Bidang (Rp) K1 - K3
- Desa Bojong					
1.	CUCU SUDRAJAT, S.IP., M.H	19750517 199403 1 002	Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan	Ketua	36.250
2.	DEDI MULYADI	19780704 200701 1 002	Petugas Ukur	Anggota/Petugas Ukur	36.250
3.	ERDAD WIGUNA	2-2856-18	Asisten Surveyor	Anggota/ Pembantu Ukur	10.000
4.	RAZY ZAMZAMI SULTHONI	2-2285-19	Asisten Surveyor	Anggota/ Pembantu Ukur	10.000

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Satgas	Biaya /Bidang (Rp) K1 - K3
- Desa Legok					
1.	CUCU SUDRAJAT, S.IP., M.H	19750517 199403 1 002	Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan	Ketua	36.250
2.	DEDI MULYADI	19780704 200701 1 002	Petugas Ukur	Anggota/Petugas Ukur	36.250
3.	INDRA SAKTI	2-0045-16	Asisten Surveyor	Anggota/ Pembantu Ukur	10.000
4.	DHIKY HARTONO	1-691-18	Surveyor Kadaster	Anggota/ Pembantu Ukur	10.000

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Satgas	Biaya /Bidang (Rp) K1 - K3
- Desa Budi Mulya					
1.	CUCU SUDRAJAT, S.IP., M.H	19750517 199403 1 002	Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan	Ketua	36.250
2.	DEDI MULYADI	19780704 200701 1 002	Petugas Ukur	Anggota/Petugas Ukur	36.250
3.	H. SAEFULOH	2-0940-14	Asisten Surveyor	Anggota/ Pembantu Ukur	10.000
4.	DIAMOND PERMADI LAKSA DEWA	2-0155-13	Asisten Surveyor	Anggota/ Pembantu Ukur	10.000

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Satgas	Biaya /Bidang (Rp) K1 - K3
- Desa Cibadak					
1.	CUCU SUDRAJAT, S.IP., M.H	19750517 199403 1 002	Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan	Ketua	36.250
2.	DEDI MULYADI	19780704 200701 1 002	Petugas Ukur	Anggota/Petugas Ukur	36.250
3.	AZNO IDRUS, SH	1-0097-115	Surveyor Kadaster	Anggota/ Pembantu Ukur	10.000
4.	JOKO KOHAR SAKTIYANTO	2-0012-18	Asisten Surveyor	Anggota/ Pembantu Ukur	10.000

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Satgas	Biaya /Bidang (Rp) K1 - K3
- Desa Cikupa					
1.	CUCU SUDRAJAT, S.IP., M.H	19750517 199403 1 002	Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan	Ketua	36.250
2.	DEDI MULYADI	19780704 200701 1 002	Petugas Ukur	Anggota/Petugas Ukur	36.250
3.	ANGGA NUGRAHA	2-0045-17	Asisten Surveyor	Anggota/ Pembantu Ukur	10.000
4.	SYARIEL RINALDI PRATAMA	2-2861-18	Asisten Surveyor	Anggota/ Pembantu Ukur	10.000

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Satgas	Biaya /Bidang (Rp) K1 - K3
- Desa Dukuh					
1.	CUCU SUDRAJAT, S.IP., M.H	19750517 199403 1 002	Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan	Ketua	36.250
2.	DEDI MULYADI	19780704 200701 1 002	Petugas Ukur	Anggota/Petugas Ukur	36.250
3.	GOGO MATONDI RAMBE	1-0109-15	Asisten Surveyor	Anggota/ Pembantu Ukur	10.000
4.	TEGUH ADITYA PRIBADI	2-2875-18	Asisten Surveyor	Anggota/ Pembantu Ukur	10.000

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Satgas	Biaya /Bidang (Rp) K1 - K3
- Desa Bojong Kamal					
1.	CUCU SUDRAJAT, S.IP., M.H	19750517 199403 1 002	Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan	Ketua	36.250
2.	DEDI MULYADI	19780704 200701 1 002	Petugas Ukur	Anggota/Petugas Ukur	36.250
3.	WAHYU PANCA	1-0018-16	Surveyor Kadaster	Anggota/ Pembantu Ukur	10.000
4.	BRANDY EYKEL SUKULTA TARINGAN	2-2868-18	Asisten Surveyor	Anggota/ Pembantu Ukur	10.000

D. Satuan Tugas Administrasi

No.	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Satgas
1.	LITA DEWI WULANDARI, S.Sos., M.Ikom	19790401 200804 2 001	Kepala Sub Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT	Ketua
2.	JONATHAN SIHOMBING	-	Pegawai Tidak Tetap/ Admin	Anggota
3.	FARUQ ZULFAHMI J	-	Pegawai Tidak Tetap/ Admin	Anggota
4.	AKHMAD JUNAEDI	-	Pegawai Tidak Tetap/ Cetak SU	Anggota
5.	ADYTIA WHISNU BRATA	-	Pegawai Tidak Tetap/ Cetak BT	Anggota
6.	SAPTO ANDRIANTO	-	Pegawai Tidak Tetap/ Integrasi	Anggota

E. Petugas Pemeriksaan Tanah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Satgas	Biaya/Bidang (Rp)
1.	CUCU SUDRAJAT, S.IP., M.H	19750517 199403 1 002	Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan	Ketua Teknis	15.500
2.	GINA, S.Sos.,M.Si	19630609 198909 1 001	Kepala Sub Seksi Fasilitas Pengadaan Tanah dan Penetapan Tanah Pemerintah	Ketua Yuridis	15.500
3.	SUHERMAN	-	Kepala Desa Bojong Kamal	Anggota	15.400
4.	ANDI YANA S.Sos	-	Kepala Desa Bojong	Anggota	15.400
5.	H. ASEP NURHIDAYAT	-	Kepala Desa Ciangir	Anggota	15.400
6.	Hj. IMAS R.L	-	Kepala Desa Cirarab	Anggota	15.400
7.	ADI SOPIAN	-	Kepala Desa Cibadak	Anggota	15.400
8.	MULYANA, S.E	-	Kepala Desa Legok	Anggota	15.400
9.	ABU MUTOLIB	-	Lurah Cikupa	Anggota	15.400
10.	ADHARUDIN	-	Kepala Desa Dukuh	Anggota	15.400
11.	H. ASAN	-	Kepala Desa Budi Mulya	Anggota	15.400

F. Penelitian Data Yuridis Panitia Ajudikasi

No.	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Satgas	Biaya/Bidang (Rp)
1.	BAMBANG MUDIYONO, SH	19630118 198603 1 003	Kepala Seksi Penataan Pertanahan	Ketua Panitia A	5.600
2.	CUCU SUDRAJAT, S.IP., M.H	19750517 199403 1 002	Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan	Wakil Ketua Panitia A	5.600
3.	GINA, S.Sos.,M.Si	19630609 198909 1 001	Kepala Sub Seksi Fasilitas Pengadaan Tanah dan Penetapan Tanah Pemerintah	Wakil Ketua Panitia A	5.600
4.	LITA DEWI WULANDARI, S.Sos., M.Ikom	19790401 200804 2 001	Kepala Sub Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT	Sekretaris	5.600
5.	SUHERMAN	-	Kepala Desa Bojong Kamal	Anggota	5.600
6.	ANDI YANA S.Sos	-	Kepala Desa Bojong	Anggota	5.600
7.	H. ASEP NURHIDAYAT	-	Kepala Desa Ciangir	Anggota	5.600
8.	Hj. IMAS R.L	-	Kepala Desa Cirarab	Anggota	5.600
9.	ADI SOPIAN	-	Kepala Desa Cibadak	Anggota	5.600
10.	MULYANA, S.E	-	Kepala Desa Legok	Anggota	5.600
11.	ABU MUTOLIB	-	Lurah Cikupa	Anggota	5.600
12.	ADHARUDIN	-	Kepala Desa Dukuh	Anggota	5.600
13.	H. ASAN	-	Kepala Desa Budi Mulya	Anggota	5.600

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Tangerang



Gembong Joko Wuryanto, S.H., M.Si
NIP. 19630130 198403 1 001



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN**

JL. H. ABDUL HAMID KAV. 8, TIGARAKSA TANGERANG 15720 TELP. (021) 5592455 FAX. (021) 5992183
EMAIL : kab-tangerang@atrpn.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG.
NOMOR : 186 /SK-36.03.UP.02.04/VII/2020**

**TENTANG
REVISI KELIMA SUSUNAN TIM III PANITIA AJUDIKASI, SATUAN TUGAS FISIK, SATUAN TUGAS
YURIDIS DAN SATUAN TUGAS ADMINISTRASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
TAHUN ANGGARAN 2020**

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi rakyat khususnya, perlu dilakukan percepatan pendaftaran tanah lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik, dan Satuan Tugas Yuridis sebagai pelaksana percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap;
- c. bahwa dalam melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang telah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Lokasi yang intinya menjadikan 43 (empat puluh tiga) desa di wilayah 7 (tujuh) kecamatan sebagai lokasi pelaksanaan Pendaftaran tanah sistematis lengkap tersebut;
- d. bahwa terhadap banyaknya bidang tanah dan jumlah desa tersebut pada huruf c di atas, maka dipandang perlu untuk membentuk lebih dari satu tim Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik, dan Satuan Tugas Yuridis, agar pelaksanaannya berjalan optimal;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tentang Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik, dan Satuan Tugas Yuridis Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang terdiri dari 5 (lima) Panitia Pelaksana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);

/ 5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3696);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
9. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
10. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemeriksaan Tanah;
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1591) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1111);
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);
16. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 37/KEP-7.1/II/2017 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
17. Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS-30.01.01/II/2019 Tanggal 01 Februari 2020 tentang Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap;
18. Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS-400/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bidang Yuridis;
19. Petunjuk Teknis Nomor 1069/3.1-100/IV/2018 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG TENTANG REVISI KELIMA SUSUNAN TIM III PANITIA AJUDIKASI, SATUAN TUGAS FISIK, SATUAN TUGAS YURIDIS DAN SATUAN TUGAS ADMINISTRASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TAHUN 2020.

/ KESATU ...

- KESATU : Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai anggota Tim III Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Wilayah Kabupaten Tangerang yang meliputi 8 Desa/Kelurahan dan 2 Kecamatan yaitu :
1. Kelurahan/Desa Mekarbakti Kecamatan Panongan
 2. Kelurahan/Desa Mekarjaya Kecamatan Panongan
 3. Kelurahan/Desa Panongan Kecamatan Panongan
 4. Kelurahan/Desa Peusar Kecamatan Panongan
 5. Kelurahan/Desa Tigaraksa Kecamatan Tigaraksa
 6. Kelurahan/Desa Rancaiyuh Kecamatan Panongan
 7. Kelurahan/Desa Rancakalapa Kecamatan Panongan
 8. Kelurahan/Desa Serdang Kulon Kecamatan Panongan
- KEDUA : Panitia Ajudikasi PTSL sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan dan menyelesaikan PTSL secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung jawab/akuntabel. Panitia Ajudikasi PTSL mempunyai tugas:
- a. menyiapkan rencana kerja dan jadwal kegiatan PTSL;
 - b. mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;
 - c. memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti kepemilikan/penguasaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - d. memeriksa kebenaran formal data fisik dan data yuridis alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah;
 - e. mengumumkan data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah yang sudah dikumpulkan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang disengketakan;
 - g. mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf e, sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak;
 - h. menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan kepada Kepala Kantor Pertanahan; dan
 - i. melakukan supervisi pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satgas Fisik dan Satgas Yuridis.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Panitia Ajudikasi PTSL dibantu oleh Satuan Tugas Fisik (Satgas Fisik), Satuan Tugas Yuridis (Satgas Yuridis), dan Satuan Tugas Administrasi (Satgas Administrasi), dengan susunan keanggotaan Satgas Fisik, Satgas Yuridis dan Satgas Administrasi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Satgas Fisik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan dan menyelesaikan PTSL secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung jawab/akuntabel. Satgas Fisik mempunyai tugas:
- a. pengukuran batas bidang tanah secara kadastral yang dituangkan pada Gambar Ukur, atas penunjukan pemilik tanah atau kuasanya;
 - b. melaksanakan pemetaan bidang tanah pada Peta Pendaftaran dan Peta Bidang Tanah;
 - c. menjalankan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang berkaitan dengan data fisik bidang tanah pada aplikasi KKP; dan
 - d. menandatangani Gambar Ukur dan seluruh dokumen dan peta hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanah; dan
 - e. membuat peta pendaftaran tanah sebagai dasar pengumpulan data fisik dan data yuridis;
- KELIMA : Satgas Yuridis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan dan menyelesaikan PTSL secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung jawab/akuntabel. Satgas Yuridis mempunyai tugas:
- a. melakukan pemeriksaan dokumen bukti kepemilikan/penguasaan bidang tanah;

/ b. memeriksa riwayat ...

- b. memeriksa riwayat tanah dan menarik surat-surat bukti pemilikan atau penguasaan tanah yang asli dan memberikan tanda terima;
- c. membuat daftar bidang-bidang tanah yang telah diajudikasi;
- d. membuat laporan pelaksanaan pekerjaan secara berkala;
- e. menyiapkan pengumuman mengenai data yuridis;
- f. menginventarisasi sanggahan/keberatan dan penyelesaiannya;
- g. menyiapkan data untuk pembuatan Daftar Isian dan pemeriksaan sertifikat; dan
- h. menginput kegiatan PTSL ke dalam Aplikasi KKP.

- KEENAM** : Satgas Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan PTSL secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung jawab/akuntabel. Satgas Administrasi mempunyai tugas:
- a. melaksanakan tugas pengetikan, penggandaan dokumen, penerimaan surat-surat umum dan pemberian tanda terimanya dan pekerjaan administratif lainnya;
 - b. menyiapkan laporan ke Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah BPN dan unit kerja lain yang dianggap perlu;
 - c. menyiapkan daftar hadir;
 - d. membuat laporan hasil rapat;
 - e. menyiapkan laporan hasil kegiatan secara berkala setiap bulan;
 - f. membuat evaluasi untuk laporan hasil kegiatan secara berkala setiap bulan;
 - g. menyiapkan pencetakan/penjahitan sertifikat; dan
 - h. mempersiapkan pertanggungjawaban keuangan.
- KETUJUH** : Sumber pendanaan untuk Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-056.01.2.429853/2020 tanggal 12 November 2019.
- KEDELAPAN** : Dengan ditetapkan Keputusan ini maka Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor : 151 /SK-36.03.UP.02.04/V/2020 Tanggal : 04 Mei 2020 tentang Revisi Keempat Susunan Tim III Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis Dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2020 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 01 Juli 2020

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Tangerang



Gembong Loko Wuryanto, S.H., M.Si
NIP. 19630130 198403 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan para Direktur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
3. Gubernur Banten;
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten;
5. Bupati Tangerang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
Nomor : 186/SK-36.03.UP.02.04/VII/2020
Tanggal : 01 Juli 2020
Tentang : Revisi Kelima Susunan TIM III Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, dan Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2020.

REVISI KELIMA SUSUNAN TIM III PANITIA AJUDIKASI, SATUAN TUGAS FISIK, SATUAN TUGAS YURIDIS
DAN SATUAN TUGAS ADMINISTRASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TAHUN 2020
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG

Penanggung Jawab : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang

A. Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

No.	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan dalam Panitia
1.	M. DIDI ALI SUBANDI, SH	19690622 199203 1 003	Kepala Seksi Pengadaan Tanah	Ketua Merangkap Anggota
2.	NUR SEPTYLIA CHOIROTUN NISAK, ST	19880927 201101 2 010	Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik	Ketua Teknis
3.	USIAWATI, S.AP	19810910 200212 2 002	Kepala Sub Seksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah	Ketua Yuridis
4.	NELLY SUGIARTI, S.Sos	19811124 200804 2 003	Pengelola BMN	Sekretaris
5.	MANSUR, SE	-	Lurah Mekarbakti	Anggota
6.	KOMARUDIN	-	Kepala Desa Mekarjaya	Anggota
7.	SUHERDI	-	Kepala Desa Panongan	Anggota
8.	DEDE NURHADI	-	Kepala Desa Peusar	Anggota
9.	SUHERMAN	-	Kepala Desa Rancaiyuh	Anggota
10.	UMAEDI	-	Kepala Desa Rancakalapa	Anggota
11.	MEGA	-	Kepala Desa Serdang Kulon	Anggota
12.	SUDRAJAT, SH	-	Kepala Desa Tigaraksa	Anggota

B. Satuan Tugas Yuridis

No	Nama	Keterangan	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Panitia	Biaya / Bidang (Rp)
- Desa Mekarbakti dan Desa Rancakalapa						
1.	SUSianto	Desa Mekarbakti dan Desa Rancakalapa	19671105 199103 1 004	Pengadministrasi Pertanahan	Ketua Merangkap Anggota	5.720
2.	MARIA MAGDALENA	Desa Mekarbakti dan Desa Rancakalapa	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	5.000
3.	DHIMAS DWIAN CAHYA SUNYOTO	Desa Mekarbakti dan Desa Rancakalapa	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
4.	RANDY BACHTIAR	Desa Mekarbakti	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
5.	EKO SURYADI	Desa Rancakalapa	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
6.	RUSWANTO	Desa Mekarbakti	-	Mitra Desa	Anggota	5.000
7.	JAANIM	Desa Mekarbakti	-	Mitra Desa	Anggota	5.000

No	Nama	Keterangan	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Panitia	Biaya / Bidang (Rp)
- Desa Peusar dan Desa Mekarjaya						
1.	SUSianto	Desa Peusar dan Desa Mekarjaya	19671105 199103 1 004	Pengadministrasi Pertanahan	Ketua Merangkap Anggota	5.720
2.	MARIA MAGDALENA	Desa Peusar dan Desa Mekarjaya	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	5.000
3.	DASTRA DARLI IJNALA	Desa Mekarjaya	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
4.	JAFAR ARAFAH	Desa Peusar	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
5.	NURDIN	Desa Peusar	-	Mitra Desa	Anggota	5.000
6.	AJAT	Desa Peusar	-	Mitra Desa	Anggota	5.000
7.	PURWAHIDIN	Desa Mekarjaya	-	Mitra Desa	Anggota	5.000
8.	WAHYUDIN	Desa Mekarjaya	-	Mitra Desa	Anggota	5.000

No	Nama	Keterangan	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Panitia	Biaya / Bidang (Rp)
- Desa Tigaraksa, Rancaiyuh, Serdang Kulon, dan Desa Panongan						
1.	PAINO	Desa Tigaraksa, Desa Rancaiyuh, Serdang Kulon, dan Desa Panongan	19640713 198503 1 004	Pengadministrasi Pertanahan	Ketua Merangkap Anggota	5.720
2.	RIFKI DARMAWAN	Desa Tigaraksa, Desa Rancaiyuh, Serdang Kulon, dan Desa Panongan	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	5.000
3.	IWAN WAHYUDI	Serdang Kulon dan Desa Panongan	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
4.	DEDIH FAHRUDI	Desa Panongan dan Desa Serdang Kulon	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
5.	DONI	Desa Tigaraksa	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
6.	EMAT	Desa Rancaiyuh dan Desa Tigaraksa	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
7.	RAMDAN	Desa Rancaiyuh	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
8.	USMAN	Desa Rancaiyuh	-	Mitra Desa	Anggota	5.000
9.	ROBI SUGARA	Desa Rancaiyuh	-	Mitra Desa	Anggota	5.000
10.	MAMIH MULYAWATI	Desa Serdang Kulon	-	Mitra Desa	Anggota	5.000
11.	SYOYUDIN SRI ROSOGO	Desa Serdang Kulon	-	Mitra Desa	Anggota	5.000
12.	SAIDI	Desa Tigaraksa	-	Mitra Desa	Anggota	5.000
13.	ROSADI	Desa Tigaraksa	-	Mitra Desa	Anggota	5.000
14.	DIDI MARYADI	Desa Panongan	-	Mitra Desa	Anggota	5.000
15.	EMAN	Desa Panongan	-	Mitra Desa	Anggota	5.000

C. Satuan Tugas Fisik

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Satgas	Biaya /Bidang (Rp) K1 - K3
- Desa Mekarbakti					
1.	NUR SEPTYLIA CHOIROTUN NISAK, ST	19880927 201101 2 010	Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik	Ketua Teknis	36.250
2.	WIRA HUDA KESARIO	19871106 200804 1 001	Petugas Ukur	Petugas Ukur	36.250
3.	RUSNENDI	1-0384-17	Surveyor Kadaster	Pembantu Ukur	10.000
4.	AGUS TIANA	2-2846-18	Asisten Surveyor	Pembantu Ukur	10.000

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Satgas	Biaya /Bidang (Rp) K1 - K3
- Desa Peusar					
1.	NUR SEPTYLIA CHOIROTUN NISAK, ST	19880927 201101 2 010	Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik	Ketua Teknis	36.250
2.	WIRA HUDA KESARIO	19871106 200804 1 001	Petugas Ukur	Anggota/Petugas Ukur	36.250
3.	EKA RAFIK SURYA NEGARA	1-0005-16	Surveyor Kadaster	Pembantu Ukur	10.000
4.	ARISTA WIJAYA	2-1358-14	Asisten Surveyor	Pembantu Ukur	10.000

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Satgas	Biaya /Bidang (Rp) K1 - K3
- Desa Rancakalapa					
1.	NUR SEPTYLIA CHOIROTUN NISAK, ST	19880927 201101 2 010	Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik	Ketua Teknis	29.000
2.	WIRA HUDA KESARIO	19871106 200804 1 001	Petugas Ukur	Anggota/Petugas Ukur	29.000
3.	DHIKY HARTONO	1-691-18	Surveyor Kadaster	Pembantu Ukur	8.000
4.	AGENG SANTOSO	2-0003-18	Asisten Surveyor	Pembantu Ukur	8.000

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Satgas	Biaya /Bidang (Rp) K1 - K3
- Desa Serdang Kulon					
1.	NUR SEPTYLIA CHOIROTUN NISAK, ST	19880927 201101 2 010	Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik	Ketua Teknis	29.000
2.	WIRA HUDA KESARIO	19871106 200804 1 001	Petugas Ukur	Anggota/Petugas Ukur	29.000
3.	MOHD. DONI KURNIAWAN	1-0381-17	Surveyor Kadaster	Pembantu Ukur	8.000
4.	ADITYA SEPTIAN	-	-	Pembantu Ukur	8.000
- Desa Rancaiyuh					
No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Satgas	Biaya /Bidang (Rp) K1 - K3
- Desa Rancaiyuh					
1.	NUR SEPTYLIA CHOIROTUN NISAK, ST	19880927 201101 2 010	Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik	Ketua Teknis	29.000
2.	WIRA HUDA KESARIO	19871106 200804 1 001	Petugas Ukur	Anggota/Petugas Ukur	29.000
3.	MUHAMAD FAUZAN	2-0939-14	Asisten Surveyor	Pembantu Ukur	8.000
4.	AHMAD SETYAWAN	2-1035-14	Asisten Surveyor	Pembantu Ukur	8.000

D. Satuan Tugas Administrasi

No.	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Satgas
1.	NELLY SUGIARTI, S.Sos	19811124 200804 2 003	Pengelola BMN	Ketua
2.	RAMDAN	-	Pegawai Tidak Tetap/ Admin	Anggota
3.	EKO SURYADI	-	Pegawai Tidak Tetap/ Admin	Anggota
4.	JAFAR ARAFAH	-	Pegawai Tidak Tetap/ Cetak SU	Anggota
5.		-	Pegawai Tidak Tetap/ Cetak BT	Anggota
6.	SUTRISNO	-	Pegawai Tidak Tetap/ Integrasi	Anggota

E. Petugas Pemeriksaan Tanah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Satgas	Biaya/Bidang (Rp)
1.	NUR SEPTYLIA CHOIROTUN NISAK, ST	19880927 201101 2 010	Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik	Ketua Teknis	15.500
2.	USIAWATI, S.AP	19810910 200212 2 002	Kepala Sub Seksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah	Ketua Yuridis	15.500
3.	MANSUR, SE	-	Lurah Mekarbakti	Anggota	15.400
4.	KOMARUDIN	-	Kepala Desa Mekarjaya	Anggota	15.400
5.	SUHERDI	-	Kepala Desa Panongan	Anggota	15.400
6.	DEDE NURHADI	-	Kepala Desa Peusar	Anggota	15.400
7.	ABDUL ROHMAN	-	Kepala Desa Rancaiyuh	Anggota	15.400
8.	UMAEDI	-	Kepala Desa Rancakalapa	Anggota	15.400
9.	MEGA	-	Kepala Desa Serdang Kulon	Anggota	15.400
10.	SUDRAJAT, SH	-	Lurah Tigaraksa	Anggota	15.400

F. Penelitian Data Yuridis Panitia Ajudikasi

No.	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Satgas	Biaya/Bidang (Rp)
1.	M. DIDI ALI SUBANDI, SH	19690622 199203 1 003	Kepala Seksi Pengadaan Tanah	Ketua Panitia A	5.600
2.	NUR SEPTYLIA CHOIROTUN NISAK, ST	19880927 201101 2 010	Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik	Wakil Ketua Panitia A	5.600
3.	USIAWATI, S.AP	19810910 200212 2 002	Kepala Sub Seksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah	Ketua Yuridis	5.600
4.	NELLY SUGIARTI, S.Sos	19811124 200804 2 003	Pengelola BMN	Sekretaris	5.600
5.	MANSUR, SE	-	Lurah Mekarbakti	Anggota	5.600

6.	KOMARUDIN	-	Kepala Desa Mekarjaya	Anggota	5.600
7.	SUHERDI	-	Kepala Desa Panongan	Anggota	5.600
8.	DEDE NURHADI	-	Kepala Desa Peusar	Anggota	5.600
9.	ABDUL ROHMAN	-	Kepala Desa Rancaiyuh	Anggota	5.600
10.	UMAEDI	-	Kepala Desa Rancakalapa	Anggota	5.600
11.	MEGA	-	Kepala Desa Serdang Kulon	Anggota	5.600
12.	SUDRAJAT, SH	-	Lurah Tigaraksa	Anggota	5.600

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN TANGERANG



GEMBONG JOKO WURYANTO, S.H., M.Si
NIP. 19630130 198403 1 001



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN**

JL. H. ABDUL HAMID KAV. 8, TIGARAKSA TANGERANG 15720 Telp. (021) 5592455 FAX. (021) 5992183
EMAIL : kantahkab.tangerang@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG.
NOMOR : 87 /SK-36.03.UP.02.04/III/2020**

**TENTANG
REVISI PERTAMA SUSUNAN TIM IV PANITIA AJUDIKASI, SATUAN TUGAS FISIK, SATUAN TUGAS
YURIDIS DAN SATUAN TUGAS ADMINISTRASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
TAHUN ANGGARAN 2020**

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi rakyat khususnya, perlu dilakukan percepatan pendaftaran tanah lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik, dan Satuan Tugas Yuridis sebagai pelaksana percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap;
- c. bahwa dalam melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang telah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Lokasi yang intinya menjadikan 43 (empat puluh tiga) desa di wilayah 7 (tujuh) kecamatan sebagai lokasi pelaksanaan Pendaftaran tanah sistematis lengkap tersebut;
- d. bahwa terhadap banyaknya bidang tanah dan jumlah desa tersebut pada huruf c di atas, maka dipandang perlu untuk membentuk lebih dari satu tim Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik, dan Satuan Tugas Yuridis, agar pelaksanaannya berjalan optimal;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tentang Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik, dan Satuan Tugas Yuridis Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang terdiri dari 5 (lima) Panitia Pelaksana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3696);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
9. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
10. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemeriksaan Tanah;
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1591) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1111);
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);
16. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 37/KEP-7.1/II/2017 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
17. Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS-30.01.01/II/2019 Tanggal 01 Februari 2020 tentang Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap;
18. Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS-400/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bidang Yuridis;
19. Petunjuk Teknis Nomor 1069/3.1-100/IV/2018 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG TENTANG REVISI PERTAMA SUSUNAN TIM IV PANITIA AJUDIKASI, SATUAN TUGAS FISIK, SATUAN TUGAS YURIDIS DAN SATUAN TUGAS ADMINISTRASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TAHUN 2020.

- KESATU : Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai anggota Tim IV Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Wilayah Kabupaten Tangerang yang meliputi 9 Desa/Kelurahan dan 3 Kecamatan yaitu :
1. Kelurahan/Desa Cempaka Kecamatan Cisoka
 2. Kelurahan/Desa Cibugel Kecamatan Cisoka
 3. Kelurahan/Desa Cisoka Kecamatan Cisoka
 4. Kelurahan/Desa Karangharja Kecamatan Cisoka
 5. Kelurahan/Desa Babakan Kecamatan Legok
 6. Kelurahan/Desa Babat Kecamatan Legok
 7. Kelurahan/Desa Kadu Agung Kecamatan Tigaraksa
 8. Kelurahan/Desa Pete Kecamatan Tigaraksa
 9. Kelurahan/Desa Sodong Kecamatan Tigaraksa
- KEDUA : Panitia Ajudikasi PTSL sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan dan menyelesaikan PTSL secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung jawab/akuntabel. Panitia Ajudikasi PTSL mempunyai tugas:
- a. menyiapkan rencana kerja dan jadwal kegiatan PTSL;
 - b. mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;
 - c. memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti kepemilikan/penguasaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - d. memeriksa kebenaran formal data fisik dan data yuridis alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah;
 - e. mengumumkan data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah yang sudah dikumpulkan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang disengketakan;
 - g. mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf e, sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak;
 - h. menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan kepada Kepala Kantor Pertanahan; dan
 - i. melakukan supervisi pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satgas Fisik dan Satgas Yuridis.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Panitia Ajudikasi PTSL dibantu oleh Satuan Tugas Fisik (Satgas Fisik), Satuan Tugas Yuridis (Satgas Yuridis), dan Satuan Tugas Administrasi (Satgas Administrasi), dengan susunan keanggotaan Satgas Fisik, Satgas Yuridis dan Satgas Administrasi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Satgas Fisik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan dan menyelesaikan PTSL secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung jawab/akuntabel. Satgas Fisik mempunyai tugas:
- a. pengukuran batas bidang tanah secara kadastral yang dituangkan pada Gambar Ukur, atas penunjukan pemilik tanah atau kuasanya;
 - b. melaksanakan pemetaan bidang tanah pada Peta Pendaftaran dan Peta Bidang Tanah;
 - c. menjalankan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang berkaitan dengan data fisik bidang tanah pada aplikasi KKP; dan
 - d. menandatangani Gambar Ukur dan seluruh dokumen dan peta hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanah; dan
 - e. membuat peta pendaftaran tanah sebagai dasar pengumpulan data fisik dan data yuridis;
- KELIMA : Satgas Yuridis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan dan menyelesaikan PTSL secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung jawab/akuntabel. Satgas Yuridis mempunyai tugas:
- a. melakukan pemeriksaan dokumen bukti kepemilikan/penguasaan bidang tanah;

- b. memeriksa riwayat tanah dan menarik surat-surat bukti pemilikan atau penguasaan tanah yang asli dan memberikan tanda terima;
- c. membuat daftar bidang-bidang tanah yang telah diajudikasi;
- d. membuat laporan pelaksanaan pekerjaan secara berkala;
- e. menyiapkan pengumuman mengenai data yuridis;
- f. menginventarisasi sanggahan/keberatan dan penyelesaiannya;
- g. menyiapkan data untuk pembuatan Daftar Isian dan pemeriksaan sertipikat; dan
- h. menginput kegiatan PTSL ke dalam Aplikasi KKP.

- KEENAM : Satgas Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan PTSL secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung jawab/akuntabel. Satgas Administrasi mempunyai tugas:
- a. melaksanakan tugas pengetikan, penggandaan dokumen, penerimaan surat-surat umum dan pemberian tanda terimanya dan pekerjaan administratif lainnya;
 - b. menyiapkan laporan ke Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah BPN dan unit kerja lain yang dianggap perlu;
 - c. menyiapkan daftar hadir;
 - d. membuat laporan hasil rapat;
 - e. menyiapkan laporan hasil kegiatan secara berkala setiap bulan;
 - f. membuat evaluasi untuk laporan hasil kegiatan secara berkala setiap bulan;
 - g. menyiapkan pencetakan/penjahitan sertipikat; dan
 - h. mempersiapkan pertanggungjawaban keuangan.
- KETUJUH : Sumber pendanaan untuk Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-056.01.2.429853/2020 tanggal 12 November 2019.
- KEDELAPAN : Dengan ditetapkan Keputusan ini maka Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor : 49 /SK-36.03.UP.02.04/I/2020 Tanggal : 10 Januari 2020 tentang Susunan Tim I Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis Dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2020 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 04 Maret 2020

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Tangerang



Gembong Joko Wuryanto, S.H., M.Si
NIP. 19630130 198403 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan para Direktur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
3. Gubernur Banten;
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten;
5. Bupati Tangerang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
Nomor : 87/SK-36.03.UP.02.04/III/2020
Tanggal : 04 Maret 2020
Tentang : Revisi Pertama Susunan TIM IV Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, dan Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2020.

REVISI PERTAMA SUSUNAN TIM IV PANITIA AJUDIKASI, SATUAN TUGAS FISIK, SATUAN TUGAS YURIDIS
DAN SATUAN TUGAS ADMINISTRASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TAHUN 2020
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG

Penanggung Jawab : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang

A. Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

No.	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan dalam Panitia
1.	ARIS PRASETIANTORO, S.H	19791019 200604 1 006	Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak	Ketua Merangkap Anggota
2.	MURWANTINI, SH	19760610 199903 2 006	Kepala Sub Seksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah	Ketua Teknis
3.	BENYAMIN SAPUTRA	19660531 198903 1 003	Analisis Pertanahan	Ketua Yuridis
4.	SUHARYANTO,SH	19760131 200701 1 002	Pengolah Data Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah	Sekretaris
5.	PERUS	-	Kepala Desa Cempaka	Anggota
6.	HAERUL SALEH	-	Kepala Desa Cibugel	Anggota
7.	RUDI	-	Kepala Desa Cisoka	Anggota
8.	ALIYAH	-	Kepala Desa Karangharja	Anggota
9.	RAHMAT HIDAYAT	-	Kepala Desa Babakan	Anggota
10	H. SUKRON MA'MUN	-	Kepala Desa Babat	Anggota
12.	RITA WULANSARI	-	Lurah Kadu Agung	Anggota
13.	ANDI SAHLANI	-	Kepala Desa Pete	Anggota
14.	DONY BAMBANG	-	Kepala Desa Sodong	Anggota

B. Satuan Tugas Yuridis

No	Nama	Keterangan	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Panitia	Biaya / Bidang (Rp)
- Desa Cempaka dan Desa Karangharja						
1	HALIMATUS SYADIIYAH	Desa Cempaka dan Desa Karangharja	19820225 200212 2 001	Pengadministrasi Pertanahan	Ketua Merangkap Anggota	5.720
2	RAHMAT ALI	Desa Cempaka dan Desa Karangharja	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
3	YAYAN SUPRIYATNA	Desa Cempaka dan Desa Karangharja	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
4	CACAN UNTUNG	Desa Cempaka	-	Mitra Desa	Anggota	5.000
5	YUSUP DHARMAWAN	Desa Cempaka	-	Mitra Desa	Anggota	5.000
6	MOH. JAINUDIN	Desa Karangharja	-	Mitra Desa	Anggota	5.000
7	EDI MULYADI IDUS	Desa Karangharja	-	Mitra Desa	Anggota	5.000

No	Nama	Keterangan	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Panitia	Biaya / Bidang (Rp)
- Desa Babat dan Desa Babakan						
1	HALIMATUS SYADIIYAH	Desa Babat dan Desa Babakan	19820225 200212 2 001	Pengadministrasi Pertanahan	Ketua Merangkap Anggota	5.720
2	RYANTO	Desa Babat dan Desa Babakan	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	5.000
3	TITO PURDANA ZAINAR	Desa Babat dan Desa Babakan	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
4.	SUHARIYAH	Desa Babat dan Desa Babakan	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
5.	H. BUDI HARTONO	Desa Babat	-	Mitra Desa	Anggota	5.000
6.	H. SATRIA	Desa Babat	-	Mitra Desa	Anggota	5.000
7.	MOCHAMAD SUBADRI	Desa Babakan	-	Mitra Desa	Anggota	5.000
8.	TAUHID	Desa Babakan	-	Mitra Desa	Anggota	5.000

No	Nama	Keterangan	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Panitia	Biaya / Bidang (Rp)
- Desa Cisoka dan Desa Pete						
1	HALIMATUS SYA'DIYAH	Desa Cisoka dan Desa Pete	19820225 200212 2 001	Pengadministrasi Pertanahan	Ketua Merangkap Anggota	5.720
2.	SAROPI	Desa Cisoka dan Desa Pete	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	5.000
3.	SUDARYONO	Desa Cisoka dan Desa Pete	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
4.	LIA APRIYANTI	Desa Cisoka dan Desa Pete	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
5.	SUMINTA	Desa Cisoka	-	Mitra Desa	Anggota	5.000
6.	M. YATNO SOFIAN	Desa Cisoka	-	Mitra Desa	Anggota	5.000
7.	MAHMUDIN	Desa Pete	-	Mitra Desa	Anggota	5.000
8.	SALWANI	Desa Pete	-	Mitra Desa	Anggota	5.000

No	Nama	Keterangan	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Panitia	Biaya / Bidang (Rp)
- Desa Kadu Agung dan Desa Sodong						
1	HALIMATUS SYA'DIYAH	Desa Kadu Agung dan Desa Sodong	19820225 200212 2 001	Pengadministrasi Pertanahan	Ketua Merangkap Anggota	5.720
2.	RYANTO	Desa Kadu Agung dan Desa Sodong				5.000
3.	IKMAL ASHARI	Desa Kadu Agung dan Desa Sodong	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
4.	DRAJAT SAEFULLAH	Desa Kadu Agung dan Desa Sodong	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
5.	DAHLIA FITRI	Desa Kadu Agung	-	Mitra Desa	Anggota	5.000
6.	Drs. AAT MULYANA	Desa Kadu Agung	-	Mitra Desa	Anggota	5.000
7.	ENDANG MUNANDAR	Desa Sodong	-	Mitra Desa	Anggota	5.000
8.	DENDI	Desa Sodong	-	Mitra Desa	Anggota	5.000

No	Nama	Keterangan	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Panitia	Biaya / Bidang (Rp)
- Desa Cibugel						
1	HALIMATUS SYA'DIYAH	Desa Cibugel	19820225 200212 2 001	Pengadministrasi Pertanahan	Ketua Merangkap Anggota	5.720
2.	AYUSWANDIRA NINGTYAS		-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	5.000
3.	AYI HIDAYAT	Desa Cibugel	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
4.	NOVI YULIANI	Desa Cibugel	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
5.	NURHADI	Desa Cibugel	-	Mitra Desa	Anggota	5.000
6.	DUMYATI	Desa Cibugel	-	Mitra Desa	Anggota	5.000

C. Satuan Tugas Fisik

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Satgas	Biaya /Bidang (Rp) K1 - K3
- Desa Babat dan Desa Babakan					
1.	MURWANTINI, SH	19760610 199903 2 006	Kepala Sub Seksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah	Ketua	36.250
2.	WIRA HUDA KESARIO	19871106 200804 1 001	Petugas Ukur	Anggota/Petugas Ukur	36.250
3.	AJAT SUDRAJAT	2-0268-19	Pembantu Ukur	Anggota/ Pembantu Ukur	10.000
4.	SEPTIAN YUYUNG PAMUNGKAS	2-1372-18	Pembantu Ukur	Anggota/ Pembantu Ukur	10.000

D. Satuan Tugas Administrasi

No.	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Satgas
1.	SUHARYANTO,SH	19760131 200701 1 002	Pengolah Data Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah	Ketua
2	SANUSI	-	Pegawai Tidak Tetap/ Admin	Anggota
3	IKSANTO	-	Pegawai Tidak Tetap/ Cetak SU	Anggota
4	AGUS RONI	-	Pegawai Tidak Tetap/ Cetak BT	Anggota
5	YOGGI RAHMAT SALEH	-	Pegawai Tidak Tetap/ Integrasi	Anggota

E. Petugas Pemeriksaan Tanah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Satgas	Biaya/Bidang (Rp)
1.	MURWANTINI, SH	19760610 199903 2 006	Kepala Sub Seksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah	Ketua Teknis	11.600
2.	BENYAMIN SAPUTRA	19660531 198903 1 003	Analisis Pertanahan	Ketua Yuridis	11.600
3.	PERUS	-	Kepala Desa Cempaka	Anggota	11.600
4.	HAERUL SALEH	-	Kepala Desa Cibugel	Anggota	11.600
5.	RUDI	-	Kepala Desa Cisoka	Anggota	11.600
6.	ALIYAH	-	Kepala Desa Karangharja	Anggota	11.600
7.	RAHMAT HIDAYAT		Kepala Desa Babakan	Anggota	11.600
8.	H. SUKRON MA'MUN		Kepala Desa Babat	Anggota	11.600
9.	RITA WULANSARI		Lurah Kadu Agung	Anggota	11.600
10.	ANDI SAHLANI		Kepala Desa Pete	Anggota	11.600
11.	DONY BAMBANG		Kepala Desa Sodong	Anggota	11.600

F. Petugas Pengolah Data/Sidang Panitia A

No.	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Satgas	Biaya/Bidang (Rp)
1.	ARIS PRASETIANTORO, S.H	19791019 200604 1 006	Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak	Ketua Panitia A	5.600
2.	MURWANTINI, SH	19760610 199903 2 006	Kepala Sub Seksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah	Wakil Ketua Panitia A	5.600
3.	BENYAMIN SAPUTRA	19660531 198903 1 003	Analisis Pertanahan	Wakil Ketua Panitia A	5.600
4.	SUHARYANTO,SH	19760131 200701 1 002	Pengolah Data Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah	Sekretaris	5.600
5.	PERUS	-	Kepala Desa Cempaka	Anggota	5.600
6.	HAERUL SALEH	-	Kepala Desa Cibugel	Anggota	5.600
7.	RUDI	-	Kepala Desa Cisoka	Anggota	5.600
8.	ALIYAH	-	Kepala Desa Karangharja	Anggota	5.600
9.	RAHMAT HIDAYAT		Kepala Desa Babakan	Anggota	5.600
10.	H. SUKRON MA'MUN		Kepala Desa Babat	Anggota	5.600
11.	RITA WULANSARI		Lurah Kadu Agung	Anggota	5.600
12.	ANDI SAHLANI		Kepala Desa Pete	Anggota	5.600
13.	DONY BAMBANG		Kepala Desa Sodong	Anggota	5.600

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Tangerang





**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN**

JL. H. ABDUL HAMID KAV. 8, TIGARAKSA TANGERANG 15720 Telp. (021) 5592455 FAX. (021) 5992183
EMAIL : kantahkab.tangerang@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG.
NOMOR : 88 /SK-36.03.UP.02.04/III/2020**

**TENTANG
REVISI PERTAMA SUSUNAN TIM V PANITIA AJUDIKASI, SATUAN TUGAS FISIK, SATUAN
TUGAS YURIDIS DAN SATUAN TUGAS ADMINISTRASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP
TAHUN ANGGARAN 2020**

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi rakyat khususnya, perlu dilakukan percepatan pendaftaran tanah lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik, dan Satuan Tugas Yuridis sebagai pelaksana percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap;
- c. bahwa dalam melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang telah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Lokasi yang intinya menjadikan 43 (empat puluh tiga) desa di wilayah 7 (tujuh) kecamatan sebagai lokasi pelaksanaan Pendaftaran tanah sistematis lengkap tersebut;
- d. bahwa terhadap banyaknya bidang tanah dan jumlah desa tersebut pada huruf c di atas, maka dipandang perlu untuk membentuk lebih dari satu tim Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik, dan Satuan Tugas Yuridis, agar pelaksanaannya berjalan optimal;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tentang Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik, dan Satuan Tugas Yuridis Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang terdiri dari 5 (lima) Panitia Pelaksana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3696);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
9. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
10. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemeriksaan Tanah;
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1591) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1111);
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);
16. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 37/KEP-7.1/I/2017 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
17. Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS-300/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
18. Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS-400/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bidang Yuridis;
19. Petunjuk Teknis Nomor 345/2.1-100/I/2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG TENTANG REVISI PERTAMA SUSUNAN TIM V PANITIA AJUDIKASI, SATUAN TUGAS FISIK, SATUAN TUGAS YURIDIS DAN SATUAN TUGAS ADMINISTRASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TAHUN 2020.

/ KESATU ...

- KESATU : Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai anggota Tim V Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Wilayah Kabupaten Tangerang yang meliputi 8 Desa/Kelurahan dan 1 Kecamatan yaitu :
1. Kelurahan/Desa Bantar Panjang Kecamatan Tigaraksa
 2. Kelurahan/Desa Cileles Kecamatan Tigaraksa
 3. Kelurahan/Desa Margasari Kecamatan Tigaraksa
 4. Kelurahan/Desa Matagara Kecamatan Tigaraksa
 5. Kelurahan/Desa Pasir Bolang Kecamatan Tigaraksa
 6. Kelurahan/Desa Pasir Nangka Kecamatan Tigaraksa
 7. Kelurahan/Desa Pematang Kecamatan Tigaraksa
 8. Kelurahan/Desa Tapos Kecamatan Tigaraksa
- KEDUA : Panitia Ajudikasi PTSL sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan dan menyelesaikan PTSL secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung jawab/akuntabel. Panitia Ajudikasi PTSL mempunyai tugas:
- a. menyiapkan rencana kerja dan jadwal kegiatan PTSL;
 - b. mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;
 - c. memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti kepemilikan/penguasaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - d. memeriksa kebenaran formal data fisik dan data yuridis alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah;
 - e. mengumumkan data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah yang sudah dikumpulkan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang disengketakan;
 - g. mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf e, sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak;
 - h. menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan kepada Kepala Kantor Pertanahan; dan
 - i. melakukan supervisi pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satgas Fisik dan Satgas Yuridis.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Panitia Ajudikasi PTSL dibantu oleh Satuan Tugas Fisik (Satgas Fisik), Satuan Tugas Yuridis (Satgas Yuridis), dan Satuan Tugas Administrasi (Satgas Administrasi), dengan susunan keanggotaan Satgas Fisik, Satgas Yuridis dan Satgas Administrasi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Satgas Fisik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan dan menyelesaikan PTSL secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung jawab/akuntabel. Satgas Fisik mempunyai tugas:
- a. pengukuran batas bidang tanah secara kadastral yang dituangkan pada Gambar Ukur, atas penunjukan pemilik tanah atau kuasanya;
 - b. melaksanakan pemetaan bidang tanah pada Peta Pendaftaran dan Peta Bidang Tanah;
 - c. menjalankan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang berkaitan dengan data fisik bidang tanah pada aplikasi KKP; dan
 - d. menandatangani Gambar Ukur dan seluruh dokumen dan peta hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanah; dan
 - e. membuat peta pendaftaran tanah sebagai dasar pengumpulan data fisik dan data yuridis;
- KELIMA : Satgas Yuridis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan dan menyelesaikan PTSL secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung jawab/akuntabel. Satgas Yuridis mempunyai tugas:
- a. melakukan pemeriksaan dokumen bukti kepemilikan/penguasaan bidang tanah;

/ b. memeriksa riwayat ...

- b. memeriksa riwayat tanah dan menarik surat-surat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah yang asli dan memberikan tanda terima;
- c. membuat daftar bidang-bidang tanah yang telah diajudikasi;
- d. membuat laporan pelaksanaan pekerjaan secara berkala;
- e. menyiapkan pengumuman mengenai data yuridis;
- f. menginventarisasi sanggahan/keberatan dan penyelesaiannya;
- g. menyiapkan data untuk pembuatan Daftar Isian dan pemeriksaan sertifikat; dan
- h. menginput kegiatan PTSL ke dalam Aplikasi KKP.

- KEENAM** : Satgas Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan PTSL secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung jawab/akuntabel. Satgas Administrasi mempunyai tugas:
- a. melaksanakan tugas pengetikan, penggandaan dokumen, penerimaan surat-surat umum dan pemberian tanda terimanya dan pekerjaan administratif lainnya;
 - b. menyiapkan laporan ke Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah BPN dan unit kerja lain yang dianggap perlu;
 - c. menyiapkan daftar hadir;
 - d. membuat laporan hasil rapat;
 - e. menyiapkan laporan hasil kegiatan secara berkala setiap bulan;
 - f. membuat evaluasi untuk laporan hasil kegiatan secara berkala setiap bulan;
 - g. menyiapkan pencetakan/penjahitan sertifikat; dan
 - h. mempersiapkan pertanggungjawaban keuangan.
- KETUJUH** : Sumber pendanaan untuk Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-056.01.2.429853/2020 tanggal 12 November 2019.
- KEDELAPAN** : Dengan ditetapkan Keputusan ini maka Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor : 50 /SK-36.03.UP.02.04/I/2020 Tanggal : 10 Januari 2020 tentang Susunan Tim I Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis Dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2020 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 04 Maret 2020

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Tangerang



Gembong Joko Wuryanto, S.H., M.Si
NIP. 19630130 198403 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan para Direktur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
3. Gubernur Banten;
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten;
5. Bupati Tangerang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 88 /SK-36.03.UP.02.04/II/2020

Tanggal : 04 Maret 2020

Tentang : Revisi Pertama Susunan TIM V Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, dan Satuan Tugas Administrasi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2020.

REVISI I SUSUNAN TIM V PANITIA AJUDIKASI, SATUAN TUGAS FISIK, SATUAN TUGAS YURIDIS
DAN SATUAN TUGAS ADMINISTRASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TAHUN 2020
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG

Penanggung Jawab : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang

A. Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

No.	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan dalam Panitia
1.	AHMAD MUNARDI, SH	19700614 199703 1 002	Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat	Ketua Merangkap Anggota
2.	DIKI MEDIANTO, ST	19710507 201212 1 003	Pangadministrasi Umum	Ketua Teknis
3.	SAIPULLAH	19700226 199103 1 004	Pengadministrasi Pertanahan	Ketua Yuridis
4.	SUDARMI, SH	19650309 198703 2 001	Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
5.	JEJEN	-	Kepala Desa Bantar panjang	Anggota
6.	AMANTA	-	Kepala Desa Cileles	Anggota
7.	MACHYUDIN BIN SARKAH	-	Kepala Desa Margasari	Anggota
8.	EDO PUTRA, S.Kom	-	Kepala Desa Matagara	Anggota
9.	DADI	-	Kepala Desa Pasir Bolang	Anggota
10.	SYAHRONI	-	Kepala Desa Pasir Nangka	Anggota
11.	E. ASNAWI	-	Kepala Desa Pematang	Anggota
12	KHAERUDIN	-	Kepala Desa Tapos	Anggota

B. Satuan Tugas Yuridis

No	Nama	Keterangan	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Panitia	Biaya / Bidang (Rp)
- Desa Cileles						
1	H. SARTONO	Desa Cileles	19660423 199011 1 002	Pengolah Data Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah	Ketua Merangkap Anggota	5.720
2	NUR AFIFAH	Desa Cileles	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	5.000
3	MOHAMAD ASEP	Desa Cileles	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
4	ANGGIT WIDIYANTO	Desa Cileles	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
5	DJAHARI	Desa Cileles	-	Mitra Desa	Anggota	5.000
6	ANWARI	Desa Cileles	-	Mitra Desa	Anggota	5.000

No	Nama	Keterangan	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Panitia	Biaya / Bidang (Rp)
- Desa Matagara						
1	H. SARTONO	Desa Matagara	19660423 199011 1 002	Pengolah Data Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah	Ketua Merangkap Anggota	5.720
2	HARYADI	Desa Matagara	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	5.000
3	AHMAD SYAMSURI	Desa Matagara	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
4	MEGA ADITYA N	Desa Matagara	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
5	DEDE KURNIAWAN	Desa Matagara	-	Mitra Desa	Anggota	5.000
6	SARUDI	Desa Matagara	-	Mitra Desa	Anggota	5.000

No	Nama	Keterangan	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Panitia	Biaya / Bidang (Rp)
- Desa Tapos						
1	H. SARTONO	Desa Tapos	19660423 199011 1 002	Pengolah Data Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah	Ketua Merangkap Anggota	5.720
2	SATRIO	Desa Tapos	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	5.000
3	ARIEF RAHMAN K	Desa Tapos	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
4	DIKI	Desa Tapos	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
5	SAMSU WAHAB	Desa Tapos	-	Mitra Desa	Anggota	5.000
6	SUHENDI	Desa Tapos	-	Mitra Desa	Anggota	5.000

No	Nama	Keterangan	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Panitia	Biaya / Bidang (Rp)
- Desa Pasir Nangka						
1	H. SARTONO	Desa Pasir Nangka	19660423 199011 1 002	Pengolah Data Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah	Ketua Merangkap Anggota	5.720
2	NUR AFIFAH	Desa Pasir Nangka	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	5.000
3	IYAN SURYANA	Desa Pasir Nangka	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
4	SENA	Desa Pasir Nangka	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
5	INDRA KURNIAWAN	Desa Pasir Nangka	-	Mitra Desa	Anggota	5.000
6	MUHAMAD DJUKRI	Desa Pasir Nangka	-	Mitra Desa	Anggota	5.000

No	Nama	Keterangan	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Panitia	Biaya / Bidang (Rp)
- Desa Margasari						
1	H. SARTONO	Desa Margasari	19660423 199011 1 002	Pengolah Data Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah	Ketua Merangkap Anggota	5.720
2	HARYADI	Desa Margasari	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	5.000
3	SYARIEF HIDAYAT	Desa Margasari	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
4	IMAN NUGRAHA	Desa Margasari	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
5	ACEP SOLIHIN	Desa Margasari	-	Mitra Desa	Anggota	5.000
6	JARKASIH	Desa Margasari	-	Mitra Desa	Anggota	5.000

No	Nama	Keterangan	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Panitia	Biaya / Bidang (Rp)
- Desa Pematang, Desa Bantar Panjang, dan Desa Pasir Bolang						
1	H. SARTONO	Desa Pematang, Desa Bantar Panjang, dan Desa Pasir Bolang	19660423 199011 1 002	Pengolah Data Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah	Ketua Merangkap Anggota	5.720
2	DIAN ARDIAN	Desa Pematang, Desa Bantar Panjang, dan Desa Pasir Bolang	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	5.000
3	SATRIO	Desa Pematang, Desa Bantar Panjang, dan Desa Pasir Bolang	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
4	AHMAD SUHENDRA	Desa Pematang, Desa Bantar Panjang, dan Desa Pasir Bolang	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota	4.500
5	WAWAN KURNIAWAN	Desa Pematang	-	Mitra Desa	Anggota	5.000
6	SULAEMAN	Desa Pematang	-	Mitra Desa	Anggota	5.000
7.	AKHMAD RUKHIYAH	Desa Bantar Panjang	-	Mitra Desa	Anggota	5.000
8.	JAMSURI	Desa Bantar Panjang	-	Mitra Desa	Anggota	5.000
9.	H. SAMSURI, S.Pd	Desa Pasir Bolang	-	Mitra Desa	Anggota	5.000
10.	HENDRA	Desa Pasir Bolang	-	Mitra Desa	Anggota	5.000

C. Satuan Tugas Administrasi

No.	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Satgas
1.	SUDARMI, SH	19650309 198703 2 001	Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian	Ketua
2.	GALIH NUGRAHA	-	Pegawai Tidak Tetap/ Admin	Anggota
3.	MULYADI	-	Pegawai Tidak Tetap/ Cetak SU	Anggota
4.	AHMAD ASMOLU	-	Pegawai Tidak Tetap/ Cetak BT	Anggota
5.	RUSMAN NURYADIN	-	Pegawai Tidak Tetap/ Integrasi	Anggota

D. Petugas Pemeriksaan Tanah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Satgas	Biaya/Bidang (Rp)
1.	DIKI MEDIANTO, ST	19710507 201212 1 003	Pangadministrasi Umum	Ketua Teknis//Penyuluh	11.600
2.	SAIPULLAH	19700226 199103 1 004	Pengadministrasi Pertanahan	Ketua Yuridis//Penyuluh	11.600
3.	JEJEN	-	Kepala Desa Bantarpanjang	Anggota	11.600
4.	AMANTA	-	Kepala Desa Cileles	Anggota	11.600
5.	MACHYUDIN BIN SARKAH	-	Kepala Desa Margasari	Anggota	11.600
6.	EDO PUTRA, S.Kom	-	Kepala Desa Matagara	Anggota	11.600
7.	DADI	-	Kepala Desa Pasir Bolang	Anggota	11.600
8.	SYAHRONI	-	Kepala Desa Pasir Nangka	Anggota	11.600
9.	E. ASNAWI	-	Kepala Desa Pematang	Anggota	11.600
10.	KHAERUDIN	-	Kepala Desa Tapos	Anggota	11.600

E. Petugas Pengolah Data/Sidang Panitia A

No.	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Satgas	Biaya/Bidang (Rp)
1.	AHMAD MUNARDI, SH	19700614 199703 1 002	Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat	Ketua Panitia A	5.600
2.	DIKI MEDIANTO, ST	19710507 201212 1 003	Pangadministrasi Umum	Wakil Ketua Panitia A	5.600
3.	SAIPULLAH	19700226 199103 1 004	Pengadministrasi Pertanahan	Wakil Ketua Panitia A	5.600
4.	SUDARMI, SH	19650309 198703 2 001	Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	5.600
5.	JEJEN	-	Kepala Desa Bantarpanjang	Anggota	5.600
6.	AMANTA	-	Kepala Desa Cileles	Anggota	5.600
7.	MACHYUDIN BIN SARKAH	-	Kepala Desa Margasari	Anggota	5.600
8.	EDO PUTRA, S.Kom	-	Kepala Desa Matagara	Anggota	5.600
9.	DADI	-	Kepala Desa Pasir Bolang	Anggota	5.600
10.	SYAHRONI	-	Kepala Desa Pasir Nangka	Anggota	5.600
11.	E. ASNAWI	-	Kepala Desa Pematang	Anggota	5.600
12.	KHAERUDIN	-	Kepala Desa Tapos	Anggota	5.600

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Tangerang



Gembong Joko Wuryanto, S.H., M.Si
NIP.19630130 198403 1 001